

PENGURUS IAI BANTUL 'SOWAN' BUPATI Isu Obat Sirup Berdampak Negatif bagi Apotek



KR-Sukro Riyadi

Jajaran pengurus IAI Bantul bersama Bupati Abdul Halim Muslih.

BANTUL (KR) - Bertepatan dengan momentum Pekan Antiresistensi Antibiotika Dunia, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Bantul minta dukungan Pemkab Bantul agar penggunaan obat antibiotik yang rasional. Langkah tersebut diambil untuk menghindari atau menekan angka resistensi terhadap penggunaan antibiotik itu. Merujuk penelitian, sejauh ini penggunaan antibiotik yang menimbulkan resistensi juga masih tinggi.

"Dalam rangka Pekan Antiresistensi Antibiotika Dunia, kami sowan ke Bapak Bupati mohon dukungan terkait dengan penggunaan obat antibiotik yang rasional," ujar Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bantul, Apt Amirul Mustofa MMR di sela beraudiensi ke Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Senin (14/11).

Pada kesempatan itu bupati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Didik Warsito MSi dan Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Raharja. Sedangkan Amirul bersama Ketua Pengurus Daerah IAI DIY Apt Hendy Ristiono MPH, Penasihat PC IAI Bantul Apt Dra Ninik Istitarini MPH, Sekretaris PC IAI Bantul Apt Wisnu Wardananingsih SFarm, Bendahara PC IAI Bantul sekaligus Dewan Pengawas PD IAI DIY Apt Harini Dewanti SSI dan Wakil Ketua PC IAI Bantul Apt Pendicho Eko Yulianto SFar.

Amirul mengungkapkan, selain minta dukungan Pemkab Bantul, IAI Bantul juga merespons terkait dengan isu yang tengah viral terkait dengan obat sirup. "Kami dari IAI Bantul itu mendukung apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah, agar kita yang di bawah ini juga sebagai pelayan tetap tenang dan tidak panik," ujarnya.

Terkait dengan isu-isu tersebut, IAI Bantul menunggu hasil investigasi lembaga terkait yang berwenang terutama dari BPOM. "Terkait dengan kebijakan isu sirup itu menimbulkan dampak. Sedikit agak terpengaruh terhadap penghasilan di apotek dan alhamdulillah mulai saat ini pelan-pelan penghasilan apotek juga sudah mulai mendekati normal," tuturnya.

Selain itu, audiensi tersebut melaporkan capaian kinerja dari IAI Bantul, terutama terkait program yang sudah direncanakan. "Hampir sebagian besar dari program terealisasi. Misalnya pemberian bantuan air bersih, pengobatan massal ataupun sosialisasi pengenalan profesi apoteker di sekolah-sekolah, lomba cerdas cermat kesehatan antara SMA. Jadi intinya tadi melaporkan pencapaian," jelasnya.

Selain itu kepengurusan IAI Bantul akan berakhir di bulan Desember, sehingga akan diadakan konferensi cabang yang merupakan forum tertinggi anggota IAI dalam memilih pengurus baru. (Roy)-f

Punya Peran Strategis, Honor PPK dan PPS Naik

BANTUL (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memerlukan anggota badan adhoc yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) berintegritas untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

"Peran strategis badan adhoc penyelenggara pemilu sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dibutuhkan kualifikasi PPK dan PPS yang berintegritas," jelas Anggota KPU Bantul Musnif Istiqomah, Selasa (15/11).

Musnif mengatakan anggota PPK dan PPS Pemilu harus memiliki pribadi kuat, jujur, serta bersikap adil supaya diperoleh proses penyelenggaraan pemilu berintegritas.

Terkait proses perekrutan badan adhoc yang berintegritas, KPU Bantul telah berkoordinasi tentang pembentukan PPK dan PPS dengan mengundang Camat dan lurah se-Bantul, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Proses pembentukan PPK dan PPS tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), mulai proses pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. Selain itu, dalam aplikasi tersebut terdapat pula menu untuk masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses seleksi PPK dan PPS.

"Dari rapat koordinasi ini diharapkan informasi mengenai pembentukan PPK dan PPS bisa tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga banyak yang terpanggil untuk bersama mensukseskan Pemilu serentak 2024," jelas Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bantul itu.

Sementara itu, persyaratan badan adhoc Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Calon anggota badan adhoc yang pernah menjabat dua kali, masih boleh mendaftar lagi. Selain itu, tidak ada batasan usia bagi calon anggota badan adhoc.

Kemudian, Musnif mengatakan ada kenaikan honor badan adhoc pa-

da Pemilu 2024, yaitu Ketua PPK mendapatkan honor sebesar Rp 2,5 juta/bulan, anggota PPK mendapat Rp 2,2 juta, sekretaris PPK memperoleh Rp 1,85 juta, serta sekretariat PPK dapat Rp 1,3 juta.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan keperluan PPK di masing-masing kecamatan sebanyak lima orang, sehingga total dibutuhkan untuk 17 kecamatan se-Bantul ada 85 orang. Dalam menjalankan tugasnya, PPK akan dibantu sekretariat berjumlah tiga orang di masing-masing kecamatan.

Didik mengatakan sekretariat PPK berasal dari unsur aparat sipil negara (ASN) dan/atau non ASN. Oleh karena itu, pembentukan sekretariat PPK akan dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan setempat untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bantul.

"Masa kerja PPK Pemilu 2024 selama 15 bulan dan mulai bekerja secara efektif Januari 2023. Diharapkan masyarakat Bantul dapat secara aktif mengikuti setiap tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan, termasuk salah satunya pembentukan badan adhoc" ujar Didik. (Jdm)-f

PEMERINTAH BAKAL MENAIKKAN CUKAI 10 PERSEN Nasib Petani Tembakau di Ujung Tanduk

BANTUL (KR) - Rencana pemerintah menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok 10% tahun 2023 berpotensi membuat petani kian terseok. Karena dari beberapa komponen bahan untuk memproduksi rokok, tembakau paling rasional untuk ditekankan harganya. Sementara Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) DIY dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APTI Kabupaten Bantul, kompak menolak rencana kenaikan cukai yang dinilai bakal merugikan petani tersebut.

"Terus terang, saya khawatir sekali dengan rencana pemerintah menaikkan cukai rata-rata 10% di

tahun 2023 nanti. Bagaimana dengan nasib petani tembakau di DIY," tutur Ketua DPD APTI DIY, Sukro Nur Harjono, didampingi Ketua DPC APTI Bantul, Muhammad Samsul Malik, Minggu (13/11).

Dijelaskan, kekhawatiran tersebut merujuk realita di lapangan bahwa tembakau jadi komponen yang bakal diturunkan harganya oleh perusahaan rokok. Karena bahan lainnya merupakan pabrikasi dengan standar harga sudah ditetapkan.

Sebaliknya, khusus tembakau paling rawan mengalami goncangan harga. "Standar harga tembakau dari tahun ke tahun tidak jelas, selama ini petani posisinya sebagai pe-

nerima harga saja. Padahal biaya operasional petani tembakau cukup tinggi," jelasnya.

Sementara Ketua DPC APTI Bantul, Muhammad Samsul Malik, menambahkan sekarang ini petani juga menghadapi anomali cuaca yang secara tidak langsung menurunkan kualitas tembakau. Sejauh ini luasan lahan yang biasa untuk budidaya tembakau tahun 2017 mencapai 600 hektare. Namun luasannya terus menyusut dan kisaran 300 hektare, karena sudah beralih untuk komoditas lainnya. "Untuk tahun ini, dalam kondisi cuaca kurang menentu lahan tanaman tembakau sekitar 41,5 hektare," ujarnya. (Roy)-f

KOMISI A DPRD KABUPATEN BANTUL

Soroti Regulasi Pilurdes dan Kebencanaan



Muhammad Agussalim
Ketua Komisi A DPRD Bantul

BANTUL (KR) - Serangkaian peristiwa bencana tanah longsor di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul jadi perhatian serius Komisi A DPRD Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan segera merespon dengan cepat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Dengan bekal anggaran

tersebut setidaknya akan lebih cepat penanganan imbas bencana alam secara umum. Tidak hanya soal bencana alam fokus perhatian Komisi A DPRD Bantul. Terkait perbedaan kredit poin ijazah bagi calon lurah jadi sesuatu hal yang mesti segera dievaluasi.

"Terkait dengan kebencanaan memang Bantul ini termasuk daerah rawan bencana, terutama di daerah Bantul timur seperti Imogiri, Pleret, Piyungan, Dlingo dan juga Pundong untuk bencana longsor. Oleh karena itu mari kita bersama-sama melakukan langkah antisipasi," ujar Ketua Komisi A DPRD Bantul, Muhammad Agus Salim.

Oleh karena itu, Agus meminta semua pihak melakukan langkah antisipasi dini terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi. Karena di bulan-bulan ini curah hujan tinggi. Menyikapi kondisi ter-

sebut, Pemerintah Kabupaten Bantul harus mengambil langkah mengantisipasi. Termasuk melakukan identifikasi bencana jika sewaktu-waktu bisa terjadi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengungkapkan, peristiwa longsor kerap terjadi dengan banyak faktor. "Seperti contoh kasus longsor, pegunungan itu salah satu fungsinya untuk kawasan penyangga air. Namun perannya tidak maksimal akibat banyak tanah yang kemudian digunakan untuk perumahan. Kemudian pohon-pohon juga banyak dipangkas.

Oleh karena itu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama relawan harus siaga. Artinya relawan perlu segera koordinasi dan juga konsolidasi untuk mengantisipasi jika ada bencana. Sehingga semua potensi bencana di Kabupaten Bantul sebisa mungkin diantisipasi bersama.

Menurut Agus Salim, sebelumnya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di 75 kalurahan di Kabupaten Bantul koordinasi dengan melaksanakan kegiatan jambore di Pantai Goa Cemara. "Waktu itu yang hadir sekitar 1.000 relawan. FPRB bisa jadi tulang



KR-Sukro Riyadi

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Suratun,SH (dua dari kanan) menyambangi warga terdampak longsor di Selopamiro Imogiri.

pongung dalam mitigasi semua potensi bencana alam di Bantul," ujarnya.

Untuk memaksimalkan penanganan bencana alam di Kabupaten Bantul. "Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bantul bisa merespon dengan cepat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Karena pada saat mengadakan anggaran dari pemerintah provinsi saya nilai kurang maksimal," ujarnya.

Selain kebencanaan, Komisi A DPRD Bantul tengah menyoroti persoalan setelah Pilurdes beberapa waktu lalu di Kabupaten Bantul. Menurut Agus Salim, bertepatan dan pasca pelaksanaan Pilurdes tersebut yang perlu diantisipasi bersama. "Karena yang menjadi permasalahan ialah, ketika salah satu calon kemudian jadi target oleh calon-calon yang lain untuk 'menghabisi' kalau bahasa kami. Artinya menghabisi untuk tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilurdes," ujarnya.

Mereka terkadang menggunakan cara-cara kurang elegan. "Serangkaian manuver dalam tahapan Pilurdes kemarin salah satunya dipicu perbedaan kredit poin ijazah. Sehingga ketika kemarin di jenjang pendidikan ini saya kira

terpaut sangat jauh. Misalnya ijazah SMA, S1 dan S2 dan sebagainya. Karena sebelum ujian pun mereka ini sudah unggul 40 poin," ujarnya.

Hal tersebut menurut Agus Salim menjadi sesuatu satu hal yang perlu segera dievaluasi bersama. "Nanti Perda Pilurdes ini betul-betul bisa kita evaluasi. Yang pertama terkait dengan kredit poin dari jenjang pendidikan. Kami ingin kesetaraan semuanya tidak tergantung kepada jenjang pendidikan," ujarnya.

Karena realita dilapangan, kerap terjadi acuan yang menjadi dasar penilaian masyarakat adalah yang pertama sosial kemasyarakatannya. Bukan pada pendidikannya, sehingga kemudian dengan pendidikan S2 dan sebagainya kemudian melenggang kredit poin 40. "Dengan masih seperti itu, kasihan dari warga masyarakat yang sudah punya nilai dan modal sosial. Kemudian mereka sudah bersosialisasi ke masyarakat dan berharap bisa menjadi calon pemimpin walaupun pendidikannya rendah," jelas Agus Salim.

Soal ijazah ini kata Agus Salim menjadi celah untuk 'menghabisi' warga atau masyarakat ataupun calon yang

berpendidikan rendah. Selain itu, berkaitan dengan masa periodisasi Lurah. "Saya kira kurun waktu 6 tahun belum bisa mengembalikan ke kondisi normal jika misalnya terjadi konflik. Karena satu hingga dua tahun ini hanya untuk bertukar dalam upaya mengembalikan harmonisasi warga yang kemarin kontra," jelasnya.

Komisi A DPRD Bantul coba merespons aspirasi para calon dan lurah agar periodisasi bisa ditambah jadi 9 tahun. Kemudian waktu ataupun maksimal menjabat dua kali. Karena sekarang tiga kali tapi dengan batasan 6 tahun. "Sebenarnya kan sama 18 tahun dibagi dua jadi perodesasinya 9 tahun. Ketika dibagi 3 jadi enam tahun. Saya kira lebih condong ke yang periodenya adalah 9 tahun seperti itu," ujarnya.

Sekarang yang menjadi 'PR' Komisi A, bagaimana dalam Pilurdes 2024 tentu perlu saling suport terkait angka kredit dari jenjang pendidikan. "Selama ini mungkin istilahnya menjadi celah dari calon mengkondisikan dengan jalan mencari sarjana-sarjana yang punya pendidikan tinggi. Kemudian untuk mengalahkan calon berijazah rendah," jelasnya. (Roy)

Komisi A DPRD Bantul	
Berjumlah personalia 9 orang, dengan komposisi pimpinan	
Ketua : Muhammad Agussalim (F-PKB)	
Wakil Ketua : Suratun,SH. (F PAN)	
Sekretaris : Jumakir (F Persatuan- Demokrat)	
ANGGOTA	
Drs Pambudi Mulya, M Si (F.PDI)	Novi Sarhati, (F.Gerindra)
Anton Wahono, S.Sos (F. PDIP)	Teguh Santosa SE (F. Partai Golkar)
Sukardiyono, SH (F Gerindra)	Sigit Nursyam Priyanto, S.Si (F PKS)



Komisi A DPRD Bantul dalam sebuah kegiatan.